

## Analysis of Accounting Implementation for Consumable Goods Inventory at the Regional Inspectorate Office of North Sulawesi Province

Nadillah Safira Murdas<sup>1\*</sup>, Dhullo Afandi<sup>2</sup>, Peter M. Kapojos<sup>3</sup>  
Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** Nadillah Safira Murdas [nadillahmurdas1702@gmail.com](mailto:nadillahmurdas1702@gmail.com)

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Application of Accounting, Inventory Recognition, Inventory Measurement, Inventory Expense, Inventory Disclosure

*Received :* 11, May

*Revised :* 13, June

*Accepted:* 15, July

©2025 Murdas, Afandi, Kapojos:  
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

According to Government Accounting Standards Statement (PSAP) 05, inventory is a current asset in the form of goods or equipment used to support government operational activities, as well as goods to be sold and/or distributed in the context of service to the community. This study aims to determine whether the accounting treatment of inventory at the Regional Inspectorate of North Sulawesi Province is in accordance with the provisions of Government Accounting Standard No. 5. This research uses descriptive qualitative method, which is a method that prioritizes in-depth observation. Based on the results of the study, it can be concluded that the application of inventory accounting for consumables at the Regional Inspectorate of North Sulawesi Province is in accordance with PSAP No. 05. This can be seen from the aspects of recognition, measurement, determination of inventory costs, and disclosure in the report, all of which refer to the provisions of PSAP No. 05 concerning Inventory Accounting.

## Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Barang Habis Pakai pada Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Nadillah Safira Murdas<sup>1\*</sup>, Dhullo Afandi<sup>2</sup>, Peter M. Kapojos<sup>3</sup>

Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** Nadillah Safira Murdas [nadillahmurdaz1702@gmail.com](mailto:nadillahmurdaz1702@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Penerapan Akuntansi, Pengakuan Inventaris, Pengukuran Persediaan, Pengeluaran Persediaan, Pengungkapan Persediaan

*Received :* 11, Mei

*Revised :* 13, Juni

*Accepted:* 15, Juli

©2025 Murdas, Afandi, Kapojos:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 05, persediaan adalah aset lancar berupa barang atau peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, serta barang yang akan dijual dan/atau didistribusikan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi persediaan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah No. 5. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang mengutamakan observasi mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi inventaris bahan habis pakai di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan PSAP No. 05. Hal ini dapat dilihat dari aspek pengakuan, pengukuran, penetapan biaya persediaan, dan pengungkapan dalam laporan, yang semuanya mengacu pada ketentuan PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan.

---

## PENDAHULUAN

Sektor publik memegang peranan penting dalam menyediakan layanan, fasilitas, dan kemudahan bagi masyarakat yang harus dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, dan efisien. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Inspektorat Daerah, dituntut untuk menyesuaikan sistem pengelolaannya guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal. Dalam konteks pengelolaan persediaan, terutama barang-barang habis pakai seperti perlengkapan alat tulis kantor, masih ditemukan beberapa kendala di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Permasalahan tersebut mencakup pencatatan persediaan yang belum terintegrasikan secara teknis, sistem distribusi yang belum tertata dengan baik, serta ketiadaan format standar untuk pelaksanaan stok opname.

Mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dianjurkan untuk menyusun serta menyosialisasikan Standard Operating Procedure (SOP) dalam pengelolaan persediaan. Mengingat persediaan merupakan bagian dari aset lancar yang rawan terhadap kesalahan pertanggungjawaban, maka dibutuhkan sistem pengelolaan yang tertib dan sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05. Oleh karena itu, mengingat pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan persediaan demi menunjang pelayanan publik, penelitian ini dilakukan untuk menelaah implementasi akuntansi persediaan barang habis pakai di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Fokus utama penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai kesesuaian penerapan akuntansi persediaan barang habis pakai di kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAP Nomor 05. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pencatatan serta pengelolaan akuntansi atas barang habis pakai dilaksanakan, serta apakah sudah memenuhi standar yang diatur oleh PSAP Nomor 05.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dalam bidang ilmu ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan manajemen persediaan dan akuntansi di sektor pemerintahan, serta dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis di masa depan. Dari sisi praktis, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi positif bagi instansi terkait melalui masukan yang bermanfaat guna meningkatkan efektivitas pengelolaan persediaan barang habis pakai di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara agar selaras dengan standar yang berlaku. Bagi penulis sendiri, penelitian ini menjadi sarana pembelajaran untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik di dunia kerja secara nyata.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Akuntansi***

Akuntansi merupakan suatu proses yang terstruktur dan sistematis, meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, merangkum, hingga menyajikan laporan atas transaksi keuangan. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Menurut pendapat Syaiful Bahri serta Hartono & Rahmi, akuntansi juga dianggap sebagai sebuah seni karena membutuhkan ketelitian serta keteraturan dalam mencatat setiap transaksi keuangan.

### ***Akuntansi Pemerintahan***

Akuntansi pemerintahan adalah cabang dari ilmu akuntansi yang fokus pada pengelolaan keuangan negara, termasuk penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta penyusunan laporan keuangan. Abdul Halim dan Sujarweni menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan bertujuan memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi, khususnya oleh pihak eksternal. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, memungkinkan pengakuan atas pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas secara menyeluruh dalam laporan keuangan. Penerapan standar ini membantu menciptakan laporan keuangan pemerintah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja keuangan pemerintah.

### ***Akuntansi Persediaan***

Menurut PSAP Nomor 05, persediaan merupakan aset lancar berupa barang atau perlengkapan yang digunakan dalam operasional pemerintahan atau disalurkan kepada masyarakat. Persediaan diakui ketika terdapat manfaat ekonomi di masa depan dan nilainya dapat diukur secara andal. Pengukuran persediaan didasarkan pada metode biaya perolehan, harga standar, atau nilai wajar, tergantung dari cara barang tersebut diperoleh. Perhitungan beban persediaan dapat menggunakan metode perpetual maupun periodik, dan informasi tentang persediaan disampaikan dalam laporan keuangan dengan menjelaskan jenis dan kondisi barang yang dimiliki.

### ***Jenis Laporan Keuangan Pemerintah***

Laporan keuangan pemerintah meliputi tujuh jenis utama, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), membandingkan anggaran dengan realisasi penerimaan dan pengeluaran.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), menunjukkan pergerakan saldo anggaran lebih antar periode.
3. Neraca, menggambarkan posisi keuangan pemerintah melalui aset, kewajiban, dan ekuitas.
4. Laporan Operasional (LO), menampilkan pendapatan serta beban dari kegiatan operasional pemerintah.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menjelaskan perubahan dalam komponen ekuitas selama periode pelaporan.

6. Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi tentang aliran kas masuk dan keluar.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), berisi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi serta rincian angka yang tercantum dalam laporan utama.

### ***Barang Habis Pakai***

Barang habis pakai, seperti alat tulis kantor (ATK), merupakan bagian penting dari persediaan yang menunjang kelancaran kegiatan administrasi dan operasional di lingkungan instansi pemerintahan. Pengelolaan barang jenis ini berada di bawah tanggung jawab bagian gudang, yang meliputi proses pencatatan penerimaan barang, pengeluaran, hingga distribusi ke unit-unit kerja terkait. Pencatatan yang rapi dan teratur sangat diperlukan agar laporan bulanan dapat disusun secara akurat serta untuk mempermudah proses pengadaan dan perencanaan anggaran di masa mendatang.

### **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menilai dan menjelaskan akuntansi persediaan barang habis pakai Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan dari Juni hingga Juli 2024 di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang terletak di Teling Atas, Wanea, Kota Manado. Data primer dan sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dokumen dan laporan kantor, dan data sekunder diperoleh melalui wawancara mendalam dengan karyawan yang menangani proses persediaan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Dokumentasi, untuk menelaah dokumen inventaris dan laporan terkait akuntansi persediaan.
2. Wawancara, untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang terlibat.
3. Observasi, guna melihat langsung praktik pelaksanaan akuntansi persediaan di lapangan.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data terkait pengakuan, pengukuran, beban, dan pengungkapan persediaan.
2. Menganalisis kesesuaian data dengan ketentuan dalam PSAP No. 5.
3. Menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan hasil analisis terhadap praktik akuntansi persediaan di instansi tersebut.

## HASIL PENELITIAN

Studi ini menunjukkan bahwa akuntansi persediaan barang habis pakai di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagian besar mengikuti ketentuan PSAP No. 5, yang mencakup elemen pengakuan, pengukuran, beban, dan pengungkapan persediaan.

### *Pengakuan Persediaan*

Persediaan diakui setelah barang diterima secara fisik dan didukung oleh berita acara serah terima. Prosesnya diawali dengan permintaan dari masing-masing unit kerja, kemudian mendapatkan persetujuan dari pejabat tata usaha, pejabat pelaksana teknis, serta Inspektur. Pencatatan persediaan baru dilakukan setelah berita acara diterima dan barang disalurkan ke unit yang memerlukan.

### *Pengukuran Persediaan*

Penilaian persediaan didasarkan pada harga pembelian terakhir (HPT) dengan metode FIFO (First in First Out). Sistem pencatatan sudah terhubung dengan aplikasi, meski sebagian proses administrasi masih dilakukan secara manual. Seluruh persediaan diperoleh melalui pembelian, tanpa adanya sumbangan maupun hasil produksi sendiri.

### *Beban Persediaan*

Pencatatan beban persediaan dilakukan pada saat barang diterima, bukan pada waktu barang tersebut dipakai. Barang-barang yang sudah tidak layak pakai hanya dicatat pada awal periode. Sistem pencatatan yang digunakan bersifat periodik. Laporan operasional tahunan dijadikan acuan untuk menganalisis kebutuhan persediaan pada periode berikutnya berdasarkan tingkat penggunaan selama satu tahun.

### *Pengungkapan Persediaan*

Inspektorat telah menyajikan kebijakan akuntansi terkait persediaan dalam laporan keuangan, termasuk perubahan nilai persediaan yang terjadi sepanjang tahun akibat transaksi pembelian dan distribusi barang. Penilaian persediaan mengacu pada metode FIFO dan mengadopsi harga pembelian terakhir yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

**Tabel 1. Persediaan Perlengkapan Barang Habis Pakai Periode April, Mei 2024 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara**

NO	Tgl Pembelian	Nama Barang	Total
1	26 April 2024	Kertas F4 75 Gr Sinar Dunia	3.100.000
2	06 Mei 2024	Kertas F4 75 Gr Sinar Dunia	3.100.000
3	13 Mei 2024	Kertas F4 75 Gr Sinar Dunia Kertas A4 75 Gr Sinar Dunia Kertas Cover Orange	3.100.000 1.475.000 660.000

4	Jumlah Keseluruhan	Total	11.435.000
---	-----------------------	-------	------------

*Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara*

Berdasarkan Penjelasan dari Ibu Jane Joseph sebagai Pembantu Pengurus Barang mengatakan bahwa : Pencatatan persediaan, seperti alat tulis kantor (ATK), tidak dilakukan saat barang tersebut rusak atau usang. Sebaliknya, barang-barang yang mengalami kerusakan atau keusangan hanya dicatat dalam kategori stok persediaan barang yang tidak terpakai. Pencatatan untuk ATK hanya dilakukan pada awal periode ketika barang tersebut diterima dan dicatat dalam stok yang tersedia. Dengan demikian, pencatatan untuk ATK dilakukan hanya pada saat kedatangan stok baru, tanpa memperhitungkan kondisi barang yang sudah rusak selama periode tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### ***Penerapan Akuntansi Persediaan Barang Habis Pakai Berdasarkan PSAP No. 5 pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara***

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi akuntansi persediaan untuk barang habis pakai di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No. 5. Standar ini mencakup pengakuan atas aset seperti barang operasional, barang dalam proses, serta barang yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Berdasarkan informasi dari petugas penyimpanan barang, nilai persediaan mengalami fluktuasi antara awal dan akhir tahun anggaran. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pembelian barang yang meningkatkan nilai persediaan, serta penyaluran barang yang menyebabkan penurunan nilai, sehingga jumlah akhir persediaan tidak sama dengan nilai pada awal tahun.

### ***Pengakuan Persediaan***

Pengakuan terhadap persediaan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan segera setelah barang atau perlengkapan diterima secara fisik dan dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti berita acara serah terima dan dokumen nilai barang. Penetapan tanggal pengakuan didasarkan pada dokumen penerimaan dan hasil evaluasi. Untuk memastikan keakuratan data, jumlah persediaan dihitung secara fisik dan dicatat pada akhir periode pelaporan. Prosedur ini telah sesuai dengan PSAP No. 5, yang menyatakan bahwa persediaan diakui ketika pemerintah berpotensi menerima manfaat ekonomi di masa mendatang dan nilai dari persediaan tersebut dapat diukur secara andal.

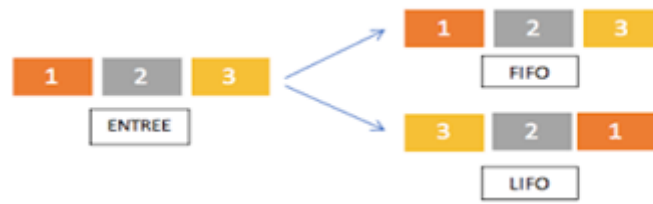
**Tabel 2. Perbandingan Pengakuan Persediaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara**

PSAP NO.5	Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Keterangan
<p>Persediaan diakui apabila memenuhi beberapa kondisi, yaitu:</p> <p>a. Pemerintah berpotensi memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dan nilai atau biayanya dapat diukur secara andal;</p> <p>b. Barang telah diterima atau hak kepemilikan maupun penguasaannya telah berpindah;</p> <p>c. Pada akhir periode akuntansi, pencatatan persediaan disesuaikan berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan.</p>	<p>Pengakuan terhadap persediaan dilakukan ketika:</p> <p>a. Persediaan memiliki nilai atau biaya yang dapat diestimasi secara andal;</p> <p>b. Pengakuan dilakukan setelah barang yang telah dipesan benar-benar diterima di kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;</p> <p>Inventarisasi fisik persediaan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan dengan menghitung dan mencocokkan jumlah barang yang tersisa di gudang pada akhir periode pembukuan.</p>	<p>Sesuai</p>

Sumber : Hasil Pengelolaan Data (2024)

### ***Pengukuran Persediaan***

Karena Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak memproduksi atau menerima sumbangan, pengukuran persediaan dilakukan berdasarkan harga pembelian. Metode FIFO – First In, First Out – digunakan untuk menilai, yang berarti barang yang pertama masuk adalah yang pertama dikeluarkan. Biaya perolehan dihitung dari harga pembelian, dan jika barang diperoleh melalui cara lain, seperti donasi, maka nilai wajar digunakan.



Gambar 1. Arus Persediaan Metode FIFO dan LIFO

Tabel 3. Perbandingan Pengukuran Persediaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

PSAP NO. 05	Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Keterangan
Penyajian nilai persediaan dilakukan berdasarkan: a. Biaya perolehan apabila barang diperoleh melalui pembelian; b. Biaya produksi apabila barang dihasilkan melalui proses produksi sendiri; c. Nilai wajar jika persediaan diperoleh melalui cara lain, seperti hibah atau barang sitaan.	a. Persediaan Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara diperoleh dengan harga perolehan dimana untuk penentuan nilai atau harga dari persediaan menggunakan harga pembelian. b. - c. -	Sesuai
Penilaian persediaan dapat dilakukan dengan: a. Metode yang sistematis, seperti metode First In First Out (FIFO) atau metode rata-rata tertimbang; b. Menggunakan harga beli terakhir apabila nilai setiap item tidak signifikan	a. Untuk pengelolaan atau penilaian persediaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu dengan menggunakan metode <i>FIFO</i> b. Untuk menentukan nilai wajar terhadap persediaan apabila diperoleh dengan harga pembelian	Sesuai

dan terdiri dari berbagai jenis barang.		
---	--	--

Sumber : Hasil Pengelolaan Data (2024)

**Beban Persediaan**

Beban persediaan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dicatat saat barang diterima, bukan saat digunakan. Untuk barang habis pakai dan barang usang, pencatatan dilakukan pada awal periode. Metode pencatatan abadi FIFO, di mana barang yang pertama masuk adalah yang pertama dikeluarkan, digunakan.

**Tabel 4. Jurnal Pencatatan Metode Periodik Pembelian dan Pemakaian Persediaan**

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
01-Januari-24	Belanja persediaan beban kertas	3.100.000	
	Kas (Bendahara Pengeluaran)		3.100.000
24-Januari-24	Tidak ada jurnal		
31-Januari-24	Beban persediaan kertas	1.550.000	
	Persediaan Kertas		1.550.000

Sumber : Hasil Pengelolaan Data (2024)

Laporan operasional dibuat setiap tahun oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ada dua metode untuk mencatat beban persediaan dalam PSAP No. 05, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, metode periodik digunakan.

**Tabel 5. Perbandingan Beban Persediaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara**

PSAP NO. 05	Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Keterangan
a. Pengeluaran persediaan dicatat berdasarkan jumlah barang yang digunakan; b. Untuk menyusun Laporan Operasional, beban persediaan	a. Beban persediaan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara seperti barang habis pakai tidak dilakukan pencatatan ketika persediaan habis pakai itu habis, namun hanya di catat ketika persediaan itu datang, barang tidak habis pakai juga di catat stok datang, dan dilakukan pencatatan hanya diawal periode. b. Beban persediaan seperti barang habis pakai ketika dalam kondisi usang tidak di lakukan pencatatan namun hanya di	Sesuai

dihitung. c. Ada dua cara untuk mencatat beban persediaan: a. Metode perpetual b. Metode periodik	masuk ke dalam stok pencatatan barang tidak terpakai. c. -	
--	---	--

Sumber : Hasil Pengelolaan Data (2024)

### ***Pengungkapan Persediaan***

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah memberikan kebijakan akuntansi yang mencakup informasi tentang jenis, jumlah, dan nilai inventaris, termasuk inventaris yang rusak atau usang. Nilai inventaris mengalami perubahan dalam laporan keuangan dari awal tahun anggaran hingga akhir tahun anggaran karena pembelian yang menambah jumlah inventaris dan distribusi yang mengurangnya. Akibatnya, nilai inventaris pada akhir tahun berbeda dengan nilai pada awal tahun.

**Tabel 6. Perbandingan Pengungkapan Persediaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara**

PSAP NO. 05	Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Keterangan
a. Teknik akuntansi yang digunakan untuk menentukan jumlah persediaan; b. Penjelasan lebih lanjut tentang perbekalan meliputi barang atau peralatan yang digunakan dalam proses pelayanan masyarakat, barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan atau diserahkan kepada	a. Berita acara rekonsiliasi digunakan untuk mengumumkan ketersediaan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam kasus ini, inventaris diungkapkan berdasarkan nilai wajarnya, dan harga pembelian digunakan untuk menilai nilainya. Metode FIFO (First In, First Out) digunakan untuk mengawasi dan memeriksa stok. b. Persediaan terdiri dari barang yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional organisasi atau pemerintah. Contohnya, persediaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari alat tulis kantor, yang merupakan barang habis pakai, dan peralatan yang tidak habis pakai, seperti komputer dan printer.	Sesuai

<p>masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.</p> <p>c. Jenis, jumlah, dan nilai barang yang rusak atau sudah tidak berguna</p>	<p>c. Inventaris yang rusak, yang tidak akan digunakan lagi, akan memengaruhi nilai inventaris.</p>	
--	---	--

Sumber : Hasil Pengelolaan Data (2024)

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan diskusi tentang penerapan akuntansi sesuai dengan PSAP No. 05, dapat disimpulkan sebagai berikut:

### 1. Pengakuan

Proses pengakuan inventaris di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah memenuhi persyaratan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 05. Barang diterima saat pengakuan dilakukan, dan tanggal dalam berita acara serah terima barang disebut sebagai pencatatan pemasukan. Hasil evaluasi barang dan dokumen penerimaan menentukan tanggal pencatatan. Nilai akhir persediaan dihitung secara fisik pada akhir periode pelaporan dan dicatat pada saat yang sama.

### 2. Pengukuran

Pengukuran persediaan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara memenuhi standar PSAP No. 05. Meskipun harga pembelian merupakan bagian dari biaya perolehan secara keseluruhan, persediaan dicatat berdasarkan harga pembelian. Karena instansi ini tidak melakukan proses produksi, tidak ada komponen biaya produksi yang diperhitungkan. Selain itu, barang persediaan yang diperoleh dari hibah tidak ada. Prinsip FIFO – First In, First Out – digunakan untuk menilai stok untuk memastikan bahwa rotasi penggunaan berjalan sesuai urutan penerimaan.

### 3. Beban Persediaan

Pencatatan beban persediaan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, seperti barang habis pakai, tidak dilakukan saat barang digunakan, tetapi dicatat pada saat barang diterima. Begitu juga dengan barang tidak habis pakai, pencatatan dilakukan pada saat kedatangan dan hanya dicatat pada awal periode. Barang yang sudah tidak layak pakai atau usang tidak secara khusus dicatat sebagai beban, melainkan tetap diklasifikasikan sebagai barang yang belum terpakai.

#### 4. Pengungkapan

Informasi mengenai persediaan diungkapkan melalui berita acara rekonsiliasi di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penilaian nilai persediaan dilakukan berdasarkan harga pembelian yang mewakili nilai wajar. Dalam pengelolaannya, penilaian persediaan menggunakan metode FIFO sebagai dasar pengukuran dan pelaporan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan persediaan, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara disarankan untuk memperkuat proses pengakuan persediaan dengan memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap kesesuaian tanggal pencatatan pemasukan barang dengan dokumen pendukung, seperti berita acara penerimaan barang. Langkah ini penting untuk meminimalkan risiko kesalahan pencatatan yang dapat berdampak pada akurasi laporan keuangan. Dalam aspek pengukuran, Inspektorat sebaiknya mempertimbangkan penggunaan sistem manajemen persediaan berbasis teknologi yang lebih canggih. Teknologi ini akan mempermudah pencatatan, penghitungan, serta menjamin penerapan metode FIFO (First In, First Out) secara lebih akurat dan efisien.

Terkait beban persediaan, barang-barang yang sudah usang atau tidak digunakan lagi sebaiknya segera dikeluarkan dari pencatatan persediaan melalui prosedur penyesuaian atau penghapusan. Hal ini bertujuan agar jumlah persediaan yang tercatat benar-benar mencerminkan kondisi aktual, serta untuk menghindari pengelolaan yang tidak efisien akibat keberadaan barang usang yang masih tercatat. Dalam hal pengungkapan, disarankan agar laporan keuangan menyajikan informasi yang lebih rinci, tidak hanya mengenai nilai dan metode yang digunakan dalam penilaian persediaan, tetapi juga kondisi barang seperti barang rusak atau tidak layak pakai. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai status persediaan.

Selain itu, pelatihan berkala bagi personel yang bertanggung jawab atas pengelolaan persediaan juga sangat diperlukan. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam mengenai standar akuntansi pemerintah, khususnya PSAP No. 5, serta prosedur pengelolaan persediaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **PENELITIAN LANJUTAN**

Untuk penelitian lanjutan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan mampu meningkatkan akurasi, efisiensi, serta transparansi dalam pengelolaan persediaan dan pelaporan keuangannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, Halim. 2015. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Jilid 1. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Ajeng Manjana, Tri Inda Fadhila Rahma, Nursantri Yanti. (2023). "Analisis Penerapan Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) MD Ponsel" *Journal on Education*.
- Akhir, T., & Hakim, M. U. (2010). Tugas akhir analisis perlakuan mubaidillah hakim. 5, 1-7.

- Albar, M., Morasa, J., & Walandouw, S. K. (2018). Analisis Perlakuan Dan Pelaporan Akuntansi Barang Milik Negara Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*,13(04),120-132.
- Angelina Deborah Umboh 2021 "Persediaan PSAP NO.5 pada Dinas Kesehatan Kota Manado" jurnal *Emba Universitas Samratulangi Manado*.
- Aprillinda Angie Waworega , Hendrik Manossoh, Steven J. Tangkuman (2018) "Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya manusia Kabupaten minahasa" *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 2020.
- Aristo Kurniawan Hulopi, Hartati Tuli, Usman (2021) "Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Koperasi di Kota Gorontalo" *Jambura Accounting Review*.
- Christian Timotius Peilouw, Dwi Dayanti Oktavia, Erna Muliana (2023) "Penerapan Akuntansi Persediaan Barang Dagang Pada Online Shop Jumun.Id" *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Inovasi Bisnis*.
- Christiane B. Haubitz and Ulrich W. Thonemann (2021) "How to Change a Running System – Controlling the Transition to Optimized Spare Parts Inventory Policies" *Sage journals Production and Operations Management*.
- Florida Noviyanti, Maria Nona Dince, Wihelmina M.Y. Jaeng (2023) "Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Barang Dagangan Pada CV Vita Permai Bolawolon" *Journal of Creative Student Research*.
- Hantono, & Rahmi, N. U. (2018). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hery. 2014. *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: PT Grasindo.
- Irawati, I. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan dan Akuntansi Aset Tetap pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus pada Badan Kepegawaian dan di klat Daerah). Skripsi, Universitas Negeri Makassar.
- Kiet Tumiwa, Ivoletti Walukow, Regina M. Losu. (2022). "Analisis Aspek Keperilakuan Terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Persediaan Pada Dinas PUPRD Provinsi Sulut" *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*.
- Mahmudi, SE., M.Si., Ak., CMA 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII PRESS
- V. Wiratna Sujarweni. 2011. *Akuntansi Sektor Publik Teori Konsep Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Marianta, Ana. (2019). "Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Berdasarkan PSAK No. 14 Pada Pabrik Roti Syahfira Medan" *Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan dan Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap.
- Peter Berling and Danja R. Sonntag (2022) "Inventory control in production inventory systems with random yield and rework: The unit-tracking approach" Sage journals Production and Operations Management.
- Pitriyani, Evi Martaseli, Tina Kartini (2021) "Analisis Sistem Akuntansi Persediaan Bahan Baku Dalam Mengendalikan Persediaan" Jurnal Akuntansi, 2021 - e- journal.unipma. ac.id.
- Psap, B., Pada, N. O., & Sakit, R. (2021). Penerapan Akuntansi Persediaan Obat-Obatan Application Of Accounting For Medicines Inventory Based On PSAP No . 05 At Majene Regional Public Hospital. 3(2), 163-175.
- Rezagi Meilano, E. C. (2020). JAAB : Jurnal of Applied Accounting And Business. Sistem Pengelolaan Penjualan Dan Pemesanan Berbasis Web di Bumdes Lestari Jaya, 2(1), 33-42.
- Salle, A. (2017). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah), 1(1), 1-19. <https://doi.org/10.52062/keuda.v1i1.740>.
- Sujarweni. (2019). Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi / V. Wiratna Sujarweni (Yogyakarta : PT Pustaka Barupress, 2019).
- Syaiful Bahri. (2020). Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS.
- Umboh, A. D., Tinangon, J. J., Perlakuan, A., Persediaan, A., No, P., di nas, P., Umboh, A. D., Tinangon, J. J., Umboh, A. D., & Tinangon, J. J. (n.d.). KESEHATAN KOTA MANADO Analysis of accounting treatment of inventories of psap no . 5 in dinas kesehatan kota manado oleh : Jurnal EMBA Vol . 9 No 2 April 2021 , Hal . 967-974. 9(5), 967-974.
- Unggul, A. D. I., Stie, B., & Surakarta, A. U. B. (2020). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Judicious Journal of Management, 1-15.
- V. Wiratna Sujarweni. 2011. Akuntansi Sektor Publik Teori Konsep Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Varun Karamshetty, Harwin De Vries, Luk N. Van Wassenhove, Sarah Dewilde, Warnyta Minnaard, Dennis Ongarora, Kennedy Abuga, and Prashant Yadav (2022) "Inventory Management Practices in Private Healthcare Facilities in Nairobi County" Sage journals Production and Operations Management.

Wa hendr, Mariati M, Tamsil 2020 "Penerapan PSAP 05 tentang akuntansi persediaan pada kantor inspektorat kab bantaeng" Accounting Journal.

Yulinar Mulyani Ismail, Herman Karamoy, Rudy J. Pusung (2021) Evaluasi penerapan pernyataan standar akuntansipemerintahan (psap) nomor 05 tentang akuntansi persediaanpada dinas perindustrian dan perdagangan daerah provinsi sulawesi utara. Jurnal Riset Akuntansi.